

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang terletak di Kawasan Cincin Api Pasifik, atau sering disebut dengan istilah *Ring of Fire*. Hal ini, mengakibatkan negara Indonesia rawan mengalami berbagai macam bencana alam yang meliputi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, banjir, dan gempa bumi. Resiko dari bencana alam ini, tidak hanya memakan korban jiwa saja, tetapi juga rusaknya infrastruktur umum, kerusakan ekosistem, hilangnya habitat hewan, dan kerugian dalam sektor ekonomi (Rita et al., 2025).

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 mengatakan bahwa, bencana alam merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengancam keselamatan kehidupan Masyarakat, disebabkan dua faktor yaitu, faktor alam baik secara tiba-tiba maupun secara bertahap dan faktor non-alam atau manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, menimbulkan korban jiwa, dan kerugian materil maupun non materil. Dalam Undang-Undang tersebut, mengklasifikasikan bencana dalam tiga kategori. Pertama, bencana alam yakni peristiwa bencana yang dipicu karena proses alam, contohnya meliputi, gempa bumi, letusan gunung merapi, banjir, tsunami, angin puting beliung, tanah longsor, serta berbagai fenomena alam lainnya. Kedua, bencana non-alam yakni bencana yang timbul akibat faktor luar alam, meliputi, menyebarnya wabah penyakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bencana sosial yakni, bencana yang terjadi akibat Tindakan manusia, misalnya konflik sosial antar kelompok Masyarakat maupun munculnya aksi terorisme (Setyorini, 2023).

Bencana menurut (Kurniawan et al., 2025), merupakan peristiwa yang terjadi karena ketidakseimbangan kondisi alam, yang meliputi angin, air, tanah, dan api. Keadaan tersebut, dapat menimbulkan berbagai dampak serius, meliputi kerusakan lingkungan, terganggunya aktivitas ekonomi, penurunan Tingkat Kesehatan Masyarakat, hingga menyebabkan korban jiwa. Bencana

adalah peristiwa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas fisik serta tatanan sosial, sehingga menghambat keberlangsungan kehidupan dan aktivitas Masyarakat (Sajali Ridwan Nur, 2022).

Upaya penanganan bencana yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia maupun negara-negara lain, berfokus pada penerapan cara kerja yang menyeluruh dan terpadu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dalam strategi ini, pemerintah mengutamakan penekanan dan pengurangan risiko melalui langkah-langkah seperti mitigasi, penyadaran, edukasi, dan pelatihan agar masyarakat dapat mengenali ancaman serta mengurangi kerentanan mereka sejak dini. Menurut (Pujani et al., 2025), mitigasi bencana adalah serangkaian Upaya yang dilakukan untuk menekan potensi dampak bencana, baik dengan penyediaan dan penguatan sarana fisik maupun melalui peningkatan pengetahuan, kewaspadaan, serta kemampuan Masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Mitigasi bencana dapat dipahami sebagai rangkaian Tindakan yang ditujukan untuk menekan Tingkat risiko bencana, dan untuk meminimalkan berbagai dampak negative yang ditimbulkan oleh bencana alam sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan serta pemahaman Masyarakat terhadap potensi ancaman bencana. Mitigasi berfungsi untuk menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat dalam menghadapi situasi darurat (Jofe et al., 2023). Salah satu strategi utama dalam berbagai inisiatif pengurangan risiko bencana adalah pengelolaan risiko berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan daya tahan terhadap bencana. Pendekatan ini biasanya dilaksanakan melalui unit pemerintahan terkecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti di tingkat desa atau kelurahan. Upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi prioritas nasional, khususnya melalui kebijakan dan program yang mendorong kemandirian masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Salah satu kebijakan atau program tersebut, dengan terbitnya Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 yang menjadi landasan pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana). Kelurahan Tangguh Bencana adalah wujud dari rasa tanggung jawab pemerintah daerah kepada Masyarakat guna

memberikan pengamanan dari resiko bencana. Program ini selaras dengan strategi-strategi prioritas yang tercantum utama pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010–2014, seperti penanggulangan bencana yang berlandaskan pada peran aktif masyarakat, peningkatan kontribusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta organisasi mitra pemerintah, dan integrasi program pengurangan risiko bencana pada perencanaan pembangunan. Selain mencakup keempat aspek yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008, konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga menekankan pentingnya mengintegrasikan inisiatif pengurangan risiko bencana oleh masyarakat ke dalam agenda pembangunan daerah (Tanjung et al., 2022).

Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, Provinsi Jawa Timur menghadapi berbagai ancaman bencana alam, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran Sungai, hingga Kawasan pesisir, menyebabkan Provinsi Jawa Timur rentan terhadap bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, serta bencana alam lainnya. Hal ini, mendorong Pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengurangan risiko bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pada peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas Masyarakat di tingkat lokal.

Menindaklanjuti kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengembangkan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Keltana) di berbagai Kabupaten dan Kota. Program ini diarahkan untuk membangun kemandirian Masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui penguatan kelembagaan kebencanaan di tingkat desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan perencanaan kebencanaan, serta penguatan Masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Dalam implementasinya, pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa daerah telah mampu mengembangkan Program Keltana secara relatif optimal dengan dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi Masyarakat yang cukup baik. Namun demikian, di sejumlah wilayah lainnya, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya sarana dan prasarana kebencanaan, serta belum optimalnya keberlanjutan kegiatan program setelah tahap pembentukan awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Keltana sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, dukungan kebijakan, serta keterlibatan aktif Masyarakat di tingkat lokal.

Keberagaman capaian implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan Keltana di tingkat kelurahan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, kelembagaan, dan sumber daya setempat. Oleh karena itu, kajian implementasi Keltana di tingkat lokal penting untuk menilai efektivitas kebijakan pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Ponorogo salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur, mempunyai 2 bentuk topografi yaitu, dataran tinggi dan dataran rendah. (Hardiawan & Mahardhani, 2022). Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah seluas 1.371,78 km² dengan ketinggian yang bervariasi antara 92 hingga 2.563 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini terbagi menjadi dua kawasan utama, yaitu daerah dataran tinggi yang mencakup Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel, sementara wilayah lainnya merupakan dataran rendah. Tercatat 14 sungai melintasi daerah tersebut dengan panjang antara 4 sampai 58 kilometer, yang berfungsi sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian, baik untuk tanaman padi maupun hortikultura. Sebagian besar wilayah Ponorogo merupakan kawasan hutan dan lahan persawahan, sedangkan bagian lainnya dimanfaatkan sebagai pekarangan. (Jannah, 2021). Sedangkan, letak geografi Kabupaten Ponorogo berada di titik koordinat 111°-17'-111°-52' bujur timur dan 7°49'-8°20' lintang Selatan. Secara wilayahnya, Kabupaten Ponorogo dari utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan

Magetan, dari Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, dari timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung, dan dari barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah (Timur), 2023).

Kondisi geografis dan topografi tersebut, menyebabkan Ponorogo termasuk wilayah yang sering terjadi bencana alam. Salah satunya, bencana banjir terutama pada daerah dataran rendahnya. Akhir tahun 2007 tepatnya di tanggal 25-26 bulan Desember, Kabupaten Ponorogo mengalami peristiwa bencana banjir yang sangat besar dalam sejarah. Hal ini, mengakibatkan 12 Kecamatan di Kabupaten Ponorogo tergenang air yang disebabkan karena, meluapnya air Sungai Bengawan Solo (Umar, 2021). Selain itu, di tahun 2017 Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Banaran Kecamatan Pulung mengalami bencana tanah longsor yang sangat dahsyat. Terdapat 28 korban jiwa meninggal dunia akibat bencana tersebut, 5 diantaranya berhasil di temukan dan di evakuasi (Nurhalim, 2023).

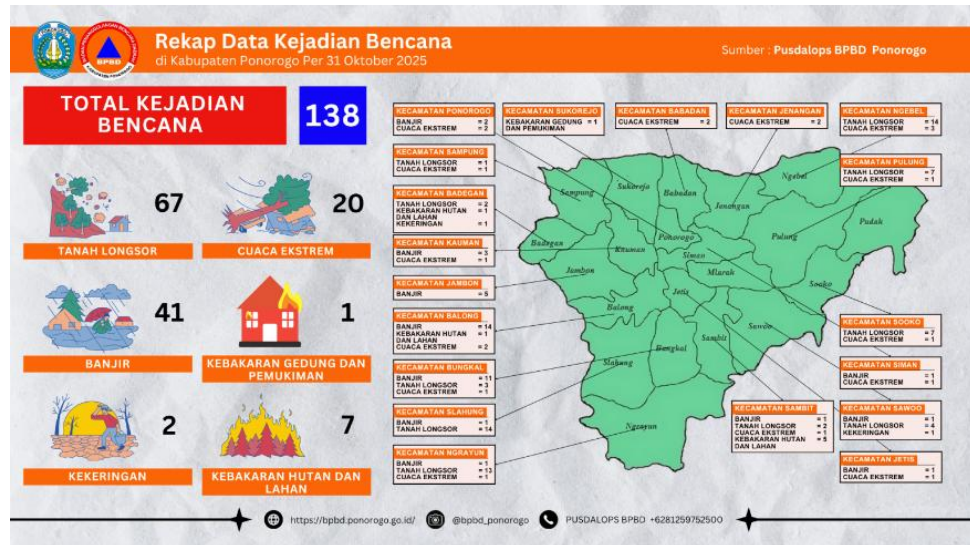
Banjir merupakan suatu kejadian alam yang ditandai dengan meluapnya air hingga menutupi wilayah yang pada kondisi normal tidak tergenang, khususnya daerah non-rawa. Selain faktor curah hujan, banjir juga dapat terjadi karena meningkatnya aliran ke permukaan yang tidak tertampung, sehingga debit air melampaui kemampuan system drainase maupun kapasitas arus Sungai. Menurut (Sunarya Derivan, 2023), banjir merupakan salah satu bentuk bencana alam yang terjadi akibat fenomena alam, terutama intensitas hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan meluapnya air dan berdampak pada berbagai kerusakan, baik terhadap lingkungan fisik maupun harta benda Masyarakat. (A. R. Ramadhan et al., 2023), berpendapat bahwa, banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi pada saat musim hujan berlangsung. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerusakan dan kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain, kondisi topografi wilayah, tingkat curah hujan tinggi, kurangnya ketersediaan daerah resapan air, dan arus sungai. Menurut (Taryana et al., 2022), terjadinya banjir dipengaruhi oleh dua kelompok penyebab utama, yakni faktor alami dan faktor yang berasal dari aktivitas manusia.

Faktor alami meliputi, tingginya intensitas curah hujan, proses erosi dan pengendapan material di sungai, keterbatasan daya tampung Sungai. Di sisi lain, faktor yang disebabkan oleh manusia antara lain, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keberadaan permukiman padat atau lingkungan kumuh di bantaran Sungai.

Tahun 2019, Kabupaten Ponorogo mengalami bencana banjir dengan total kurang lebih 10 kecamatan terdampak. Salah satunya kecamatan Ponorogo, yaitu kelurahan Paju, kelurahan Tonatan, kelurahan Pinggirsari dan kelurahan Brotonegaran (Handayani, 2019). Dalam bencana tersebut, jalur utama Kota sementara ditutup total. Beberapa warga yang terdampak, dievakuasi secara bersama oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas BPBD, relawan Banser NU, serta Pemuda Muhammadiyah dengan memanfaatkan perahu karet sebagai sarana penyelamatan. BPBD juga telah mempersiapkan 2 tempat pengungsian, Pendapa dan Masjid Agung Kabupaten Ponorogo (Iswinarno, 2019).

Tahun 2024 tepatnya di bulan Desember, Kabupaten Ponorogo kembali mengalami bencana banjir dan memakan 2 korban jiwa akibat terselat arus banjir yang deras. Terdapat 7 kecamatan yang terendam banjir antara lain, Sawoo, Sambit, Jetis, Siman, Mlarak, Balong dan Ponorogo. Selain menelan korban jiwa, bencana banjir tersebut juga mengakibatkan terhentinya arus transportasi di jalur utama yang menghubungkan Ponorogo-Pacitan serta Ponorogo-Trenggalek. Jalan raya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor karena tertutup luapan air sungai yang meluber hingga ke badan jalan. Untuk menangani peristiwa tersebut, pemerintah kabupaten beserta seluruh perangkat terkait segera turun langsung ke lokasi. Petugas di lapangan memusatkan upaya pada evakuasi, yaitu memindahkan ratusan warga yang terdampak ke area yang lebih aman. Selain itu, petugas kesehatan juga dikerahkan ke berbagai titik yang mengalami dampak banjir. Di samping itu, fasilitas dapur umum turut dibuka untuk menyediakan kebutuhan makanan bagi para warga yang mengungsi (S. Widodo, 2024).

Gambar 1.1 Rekap Data Bencana Kabupaten Ponorogo



(sumber: Instagram BPBD Kab. Ponorogo)

BPBD Kabupaten Ponorogo merekap terdapat 138 kejadian bencana sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Oktober 2025. Berdasarkan rekapitulasi kejadian bencana yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo per 31 Oktober 2025, tercatat terdapat 138 peristiwa bencana yang terjadi di 21 kecamatan. Data yang dihimpun Pusdalops BPBD tersebut menunjukkan bahwa tanah longsor menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 67 kasus. Setelah itu, terdapat 41 kejadian banjir, serta 20 kejadian cuaca ekstrem. Selain tiga jenis bencana utama tersebut, BPBD juga mencatat 7 kasus kebakaran hutan dan lahan, 2 peristiwa kekeringan, dan 1 kejadian kebakaran bangunan atau permukiman. Beberapa kecamatan tercatat memiliki angka kejadian tertinggi. Kecamatan Ngebel menduduki posisi pertama dengan 17 peristiwa, terdiri dari 14 kejadian tanah longsor dan 3 kejadian cuaca ekstrem. Kecamatan Bungkal juga termasuk wilayah yang cukup terdampak, dengan total 13 kejadian yang meliputi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Sementara itu, Kecamatan Balong mengalami 14 bencana, sebagian besar berupa banjir, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Kecamatan lainnya, seperti Sampung, Badegan, Kauman, Jenangan, Babadan, Sukorejo, Jetis, Sawoo, hingga Sooko juga melaporkan kejadian bencana dengan jenis yang beragam. Pola sebaran

bencana tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan topografi perbukitan cenderung lebih rentan terhadap tanah longsor, sedangkan daerah dataran rendah lebih sering mengalami banjir. (Rh., 2025b). Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Ponorogo masih tergolong tinggi. Kejadian banjir masih sering terjadi setiap tahun dan berdampak pada permukiman, lahan pertanian, serta aktivitas masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa risiko banjir di daerah ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan secara optimal.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya BPBD, membentuk Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012. Program ini juga merupakan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Lisdyarita, Jilid II salah satunya terkait cepat tanggap dalam penanganan bencana dan memaksimalkan mitigasi bencana. BPBD menetapkan dua wilayah yaitu, Kelurahan Paju sebagai Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) dan Desa Sedarat Balong sebagai Destana (Desa Tangguh Bencana). BPBD mempersiapkan 770 warga siap Tangguh bencana dengan rincian, 70 keluarga Tangguh bencana (katana), 50 relawan kebencanaan baru, 50 relawan keamanan lingkungan, dan 600 siswa sekolah rintisan sadar bencana (Dwi, 2025).

Melalui program ini, warga dibekali kemampuan mengenali risiko, melakukan pencegahan, serta merespons keadaan darurat secara cepat dan terkoordinasi. Kelurahan Tangguh Bencana juga berperan sebagai pusat koordinasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan BPBD dalam penyusunan rencana evakuasi, pemetaan risiko kawasan, serta penyediaan informasi kebencanaan. Selain itu, Keltana menjalankan fungsi edukasi dan pelatihan melalui sosialisasi, simulasi, dan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat semakin siap menghadapi ancaman bencana. Dalam situasi darurat, Kelurahan Tangguh Bencana berfungsi sebagai posko terpadu untuk evakuasi, penyaluran bantuan, hingga pemulihan pasca bencana, sehingga

keberadaannya menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang mandiri, siaga, dan tangguh terhadap bencana.

Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Ponorogo sementara ini masih diterapkan di satu Kelurahan saja tepatnya, di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo. Kegiatan pembukaan pelatihan dan pembentukan Program Kelurahan Tangguh Bencana ini, diselenggarakan dalam waktu satu minggu mulai tanggal 21-28 Mei 2025. Dengan peserta sebanyak 30 orang terdiri dari, tokoh masyarakat paju, tokoh pemuda, serta pemerintah kelurahan Paju. Kegiatan ini, juga dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim SM, S.Pd, M.M, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, S.T., M.Si, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo, Masun, S.Pt., M.P., M.A., M.Ec.Dev., serta unsur Forkopimcam Kabupaten Ponorogo. Program ini, menjadi upaya nyata yang dilakukan oleh BPBD Jawa Timur dengan BPBD Ponorogo untuk memperkuat kemampuan masyarakat agar mampu menangani bencana secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan sejumlah materi kunci, termasuk pengenalan dan pemetaan risiko bencana guna mengidentifikasi sumber bahaya serta tingkat kerentanan di lingkungan kelurahan. Melalui pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan lebih peka terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar mereka. Selain itu, peserta turut mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan rencana antisipasi banjir. Mengingat wilayah tersebut rentan terdampak banjir pada musim hujan, perencanaan ini menjadi sangat penting agar masyarakat memiliki panduan yang jelas mengenai tindakan yang perlu dilakukan sebelum bencana terjadi, saat banjir berlangsung, hingga tahap pemulihan setelahnya. Tahap akhir dari rangkaian kegiatan ini ditandai dengan dibentuknya kelompok relawan serta forum pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan (Rh., 2025).

Melihat kondisi tersebut, semakin jelas bahwa penanganan bencana di Kabupaten Ponorogo tidak hanya membutuhkan penguatan sistem, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat

dalam merespons situasi darurat secara cepat dan tepat. Peningkatan kapasitas masyarakat mencakup serangkaian upaya, seperti edukasi, pelatihan, simulasi bencana, dan penyediaan informasi yang relevan, yang bertujuan agar masyarakat mampu mengenali potensi bahaya, memahami langkah-langkah penyelamatan diri, serta mengambil tindakan preventif sebelum bencana terjadi (Triani et al., 2024).

Kerentanan wilayah yang tinggi, frekuensi kejadian bencana yang terus berulang, serta keterbatasan pemerintah dalam menjangkau seluruh titik rawan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai komponen krusial dalam upaya pengurangan risiko. Banyak kejadian menunjukkan bahwa respons awal terhadap bencana hampir selalu dilakukan oleh warga sekitar sebelum bantuan pemerintah tiba.

Dengan demikian, keberadaan Kelurahan Tangguh Bencana bukan hanya sebagai implementasi kebijakan nasional, tetapi juga menjadi kebutuhan nyata untuk mewujudkan masyarakat Ponorogo khususnya kelurahan Paju yang lebih mandiri, sigap, dan tangguh dalam menghadapi bencana banjir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan tema “Implementasi Kebijakan Program Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) Di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo”. Peneliti bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo, serta menilai koordinasi antara BPBD, Pihak Kelurahan, Anggota Keltana dan Masyarakat Paju dalam pelaksanaan pembentukan Program Keltana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dukungan sumber daya (sarana, prasarana) yang disediakan dalam Program Keltana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana koordinasi komunikasi antara BPBD, Kelurahan Paju, Anggota Keltana, dan Masyarakat Paju dalam Pelaksanaan Pembentukan Program Keltana?
3. Apa dukungan sumber daya (sarana, prasarana) yang disediakan dalam Program Keltana?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi komunikasi antara BPBD, Kelurahan Paju, Anggota Keltana, dan Masyarakat Paju dalam Pelaksanaan Pembentukan Program Kelurahan Tangguh Bencana
3. Mengidentifikasi dukungan sumber daya (sarana, prasarana) yang disediakan dalam Program Keltana

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2012 dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana koordinasi komunikasi antara BPBD, Kelurahan Paju, Anggota Keltana, dan Masyarakat Paju dalam Pelaksanaan Pembentukan Program Keltana
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu Mengidentifikasi dukungan sumber daya (sarana, prasarana) yang disediakan dalam Program Keltana

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kelurahan Paju

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat peran kelurahan dalam mendukung

pelaksanaan Program Keltana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap

b. Bagi BPBD Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2012 dalam pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana), khususnya terkait koordinasi, komunikasi, serta dukungan sumber daya Tingkat kelurahan

c. Bagi Masyarakat Kelurahan Paju:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana, khususnya dalam mendukung komunikasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya kebencanaan di lingkungan kelurahan.

d. Bagi Lembaga Pendidikan atau Akademisi:

Penelitian ini menjadi referensi ilmiah dalam pembelajaran dan penelitian mengenai kebijakan kebencanaan, implementasi program pemerintah, serta studi kebencanaan lokal.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah tahapan atau proses merumuskan suatu kebijakan, program, ide, atau rencana dalam bentuk tindakan yang nyata untuk mewujudkan sebuah tujuan yang telah disusun secara optimal. Menurut (Wiyanti et al., 2023) Implementasi dapat diartikan sebagai rangkaian strategi yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan seluruh rangkaian kebijakan yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Proses ini mencakup upaya nyata dalam mempersiapkan seluruh komponen pendukung yang dibutuhkan, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Selain itu, terdapat penentuan aktor atau pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, lokasi atau wilayah pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan jadwal waktu mulai hingga berakhirnya kegiatan tersebut. Implementasi dapat dipahami

sebagai suatu rangkaian proses yang terus berkembang, di mana para pelaksana kebijakan menjalankan serangkaian tindakan, program, atau kegiatan secara terstruktur dengan tujuan untuk mewujudkan hasil yang sama dengan tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam kebijakan tersebut. (Fauzan, 2024). Implementasi menurut (Wibowo, 2023), dapat dipahami sebagai kegiatan melaksanakan atau menerapkan suatu rencana. Implementasi juga berarti, gagasan, ide, maupun inovasi dalam Tindakan nyata sehingga menghasilkan dampak tertentu yang menghasilkan perubahan pemahaman, kemampuan, serta penanaman sikap dan nilai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan, aturan, yang dibuat oleh pihak yang berwenang seperti, pemerintah, lembaga, maupun sebuah organisasi untuk mengarahkan, mengatur, dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam Masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. (F. E. Dwi et al., 2024) berpendapat bahwa, kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dirancang secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai cara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam penerapannya, kebijakan memanfaatkan sumber daya atau sarana yang tersedia dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk memastikan efektivitas serta pencapaian tujuan yang diharapkan. Menurut pendapat (Anita, 2021), kebijakan dapat dimaknai sebagai rangkaian Keputusan yang ditetapkan oleh aktor politik dalam menentukan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai bentuk Tindakan yang terencana dan terarah, yang disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta berlandaskan pada aturan, prinsip, dan norma yang berlaku. (Aldila Romanda, 2025), berpendapat bahwa kebijakan merupakan gagasan, prinsip yang digunakan sebagai landasan perencanaan serta pelaksanaan suatu kegiatan, dan pengambilan sebuah Keputusan. Konsep kebijakan dapat diterapkan dalam

berbagai konteks, baik dalam pemerintahan, sektor swasta, Lembaga, maupun pada Tingkat individu.

3. Program

Pengertian program dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu umum dan khusus. Secara umum, program adalah suatu rencana atau susunan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara khususnya, program merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu dan biasanya membutuhkan masa pelaksanaan yang relatif panjang. Program juga dapat dipahami sebagai kumpulan kegiatan yang tersusun dalam satu sistem yang saling berhubungan, serta melibatkan lebih dari satu pihak dalam pelaksanaannya. (Siregar et al., 2024). Program merupakan rangkaian aktivitas yang menjadi wujud nyata pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Dalam prosesnya, program tidak berlangsung secara monoton, melainkan berjalan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaannya berada dalam lingkup sebuah organisasi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang jelas, serta melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama, saling berkoordinasi, dan memiliki peran masing-masing. Program dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang dirancang untuk menjalankan sebuah kebijakan tertentu. Program dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup Panjang dan berkelanjutan. Selain itu, program berlangsung dalam suatu struktur organisasi dan melibatkan kerja sama sejumlah individu atau kelompok yang memiliki peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (S. A. Putri & Nawangsari, 2023). Istilah program menurut (Diana Ayu, 2023), dimaknai sebagai suatu rencana atau rancangan kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Program berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan Langkah-langkah yang akan dilakukan pada waktu yang telah direncanakan. Dengan demikian, program menjadi pedoman maupun landasan dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan terarah.

4. Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana)

Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah komunitas masyarakat yang dibangun untuk memiliki kapasitas mandiri dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai potensi ancaman bencana. Masyarakat di dalamnya dibekali kemampuan untuk merespons setiap kondisi darurat secara cepat dan tepat, sehingga mampu meminimalisir risiko yang ditimbulkan. (Anditia Jane, Hermawan Dedy, 2021). Kelurahan Tangguh Bencana merupakan wilayah yang memiliki kemandirian dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, mampu meminimalisir potensi risiko yang ditimbulkan, serta dapat pulih kembali setelah mengalami dampak yang merugikan. Kelurahan Tangguh Bencana sendiri merupakan suatu gagasan sekaligus program yang diimplementasikan di banyak negara, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor, maupun fenomena alam lainnya. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kesiapsiagaan serta membangun ketangguhan masyarakat di tingkat lokal agar mampu menghadapi dan mengelola situasi bencana secara efektif sesuai dengan peraturan BNPB tahun 2012. (Budiman Lalu, Akbar Thariq, 2024). Menurut (thalib tety, rachman ellys, 2023), Program Kelurahan Tangguh Bencana Adalah bentuk komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Upaya perlindungan kepada Masyarakat dari berbagai potensi resiko bencana. Mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Kelurahan Tangguh Bencana, dijelaskan bahwa Kelurahan Tangguh Bencana merupakan wilayah yang memiliki kapasitas dan kemandirian untuk menyesuaikan diri, menghadapi ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana, serta mampu melakukan pemulihan secara cepat dan efektif dari dampak yang ditimbulkan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh (Putri et al., 2019) dengan judul “Dampak Implementasi Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung”. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta alternatif solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk menganalisis permasalahan, penelitian ini mengacu pada teori faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George Edward III. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa, pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, yang diimplementasikan oleh BPBD Kabupaten Badung bersama pihak kelurahan, instansi terkait, serta masyarakat, yang mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Dampak yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal, Beberapa kendala ditemukan dalam proses implementasi, antara lain rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penanggulangan bencana, keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan, tidak memadainya prosedur dan regulasi operasional penanggulangan bencana, serta belum tersedianya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yang terintegrasi secara menyeluruh, serta Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana pendukung program, memperkuat kerja sama dengan instansi terkait maupun masyarakat, serta melakukan evaluasi regulasi terkait program Keltana/Destana.

Penelitian oleh (Syahrul, 2023) dengan judul “Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Melalui Implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Program Kelurahan Tangguh Bencana berjalan efektif dalam memaksimalkan kesiapsiagaan masyarakat mengantisipasi berbagai

potensi bencana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, pemaparan informasi, serta perumusan simpulan akhir. Hasil dari penelitian ini antara lain, Program Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Makassar belum menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan serta belum terlaksana secara optimal karena sejumlah kendala, seperti keterbatasan kualitas maupun jumlah SDM, pergeseran prioritas penanganan bencana ke masa darurat Covid-19. serta minimnya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam merespons program tersebut, Kurang atau minimnya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam merespons Program Kelurahan Tangguh Bencana tersebut.

Penelitian (Irvan, 2023) dengan judul “Optimalisasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Pada Pengurangan Risiko Bencana Di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur”. Tujuan penelitian ini yaitu, mengkaji serta menggambarkan tingkat efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana dalam meminimalisir resiko bencana alam di Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Serta, Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, interview atau sesi tanya jawab, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini, Dari 21 Kelurahan Tangguh Bencana, hanya 4 kelurahan tingkat madya yang dinilai sudah berjalan optimal, Kelurahan tingkat pratama belum berjalan optimal karena rendahnya keaktifan pengurus dan Masyarakat, Penguatan kapasitas masyarakat yang masih rendah.

Penelitian (Anggun, 2023) berjudul “Implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana Tsunami Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini memiliki tujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Program Kelurahan

Tangguh Bencana dalam upaya menekan risiko tsunami di Kota Padang selama tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik. Program ini mampu meningkatkan potensi Masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi dalam upaya pencegahan risiko tsunami. Namun demikian, terdapat beberapa kendala antara lain, Keterbatasan fasilitas pendukung, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal, Partisipasi Masyarakat yang belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan masih adanya beberapa warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam program tersebut, Koordinasi yang belum maksimal antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dengan pihak kelurahan.

Penelitian (Muflihul, 2023) tentang “Pengurangan Risiko Bencana Banjir Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Program Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan proses mitigasi risiko banjir yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kota Semarang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui proses wawancara, pengamatan, serta pengumpulan berbagai dokumentasi terkait. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Sebagian masyarakat yang tergabung dalam anggota Kelurahan Tangguh Bencana yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan, banyak yang pindah setelah beberapa tahun kemudian, Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana, sehingga aktivitas program tidak berjalan optimal tanpa dorongan dari pihak luar, serta Warga menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan sarana dan

prasarana pendukung yang dianggap belum memadai untuk menunjang pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana.

Penelitian oleh (Romadhan Apriyanto, Rahman Taufik, Sihidi Taqwa, 2022) dengan judul “Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana Di Bandungregosari Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Program Kelurahan Tangguh Bencana di wilayah Bandungregosari sebagai strategi meminimalisir potensi dampak bencana di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan data dikumpulkan dengan observasi lapangan, wawancara dengan informan serta sesi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peningkatan pemahaman masyarakat. Setelah adanya sosialisasi dan simulasi, warga memperoleh pengetahuan baru tentang prosedur menghadapi bencana, Pemberdayaan kelompok rentan. Kelompok rentan (seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan ibu hamil) menjadi lebih siap dan mengetahui langkah yang harus diambil saat bencana terjadi.

Penelitian (R. Ramadhan & Maruahey, 2025) yang berjudul “Implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana dalam Sistem Peringatan Dini Bencana di Kota Bogor”. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan menganalisis bagaimana Program Kelurahan Tangguh Bencana yang merupakan inisiatif BNPB untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat diimplementasikan sebagai upaya mengurangi ancaman serta dampak bencana. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data melalui interview, literature review, dan dokumentasi atau arsip. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Bogor turut berkontribusi besar dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersiap dan bertahan menghadapi ancaman bencana. Melalui sistem peringatan dini yang terkoordinasi, warga dapat mengetahui potensi bahaya lebih cepat, sehingga tindakan pencegahan dan penyelamatan dapat dilakukan secara lebih efektif untuk meminimalkan korban maupun kerusakan. Meski

demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain, Keterbatasan pemanfaatan teknologi, Tingkat partisipasi Masyarakat yang kurang, Ketidamerataan kegiatan pelatihan di beberapa wilayah, Kondisi geografis tertentu yang menyulitkan akses ke sejumlah kelurahan, Kurangnya koordinasi antara pihak BPBD, Kecamatan, Kelurahan, serta Lembaga lain seperti Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

Penelitian oleh (Alhadi Zikri, 2024) dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Olo Kota Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh serta menggambarkan berbagai faktor yang menentukan tingkat keberhasilan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Olo, Kota Padang. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana. Mereka meliputi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, pakar kebencanaan, Lurah Olo, Kepala Seksi Ketertiban Kelurahan Olo, Kelompok Tangguh Bencana, serta warga yang tinggal di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kurangnya sumber daya manusia, sebagian besar anggota kelompok yang tergabung dalam Kelurahan Tangguh Bencana tidak menetap lagi di kelurahan tersebut, karena merantau, pekerjaan dan kepentingan lainnya. Hal ini, mengakibatkan seringnya perubahan struktur anggota kepengurusan, sehingga berdampak pada kelangsungan program kelurahan Tangguh bencana tersebut, Ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga masyarakat terpaksa menggunakan peralatan pribadi atau meminjam dari warga lain. Hal tersebut, menyebabkan kurangnya efisiensi program Kelurahan Tangguh Bencana.

Penelitian (Salwa Rimala, 2019) berjudul “Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Padang”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program ketahanan bencana

di tingkat kelurahan serta menentukan layak atau tidaknya program tersebut untuk dilanjutkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi dokumentasi, lalu data yang terkumpul dianalisis dengan tahap penyajian, reduksi, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini, Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang, belum berjalan sesuai dengan baik sesuai dengan harapan, Pemahaman serta pengetahuan warga Lolong Belanti tentang tata cara mengurangi risiko bencana masih kurang memadai, Dana untuk mendukung dan menunjang Program Kelurahan Tangguh Bencana sangat terbatas, Kelurahan Lolong Belanti mengalami kekurangan tenaga kerja, di mana saat ini hanya terdapat tiga pegawai yang aktif, Kekuatan program ini terletak pada keberadaan kelompok relawan siaga bencana yang jumlahnya cukup besar serta dukungan pegawai kelurahan dalam mengelola administrasi untuk BPBD Kota Padang, sehingga pelaksanaan program tersebut belum berjalan dengan lancar, Kelemahan program ini meliputi, keterbatasan dana, kurangnya fasilitas serta pemeliharaan fasilitas yang kurang memadai. Namun, Kelurahan Lolong Belanti memiliki peluang melalui strategi yang diterapkan dalam menjalankan program yang ada. Salah satu ancaman terhadap program ini adalah, rendahnya kapasitas dan pengetahuan Masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di wilayah Kota Padang yang rawan.

Penelitian (Muhammad, 2020) berjudul “Pengaruh Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Terhadap Ketangguhan Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penyelenggaraan lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memberikan dampak terhadap peningkatan ketangguhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan rancangan pra-eksperimental, khususnya model *one group pretest-posttest*. Sebanyak 47 responden dilibatkan sebagai sampel penelitian, yang dipilih melalui teknik *purposive*

sampling. Penelitian ini menunjukkan hasil, bahwa, Sebelum diberi pembekalan dan pelatihan, rata-rata tingkat ketangguhan masyarakat 96,19. Hal tersebut, menunjukkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih berada pada kategori rendah. Setelah diberi pembekalan dan pelatihan, rata-rata ketangguhan masyarakat meningkat menjadi 167,36. Hal tersebut, menunjukkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta, Peningkatan skor menunjukkan bahwa kegiatan yang diberikan (lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana) efektif meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu, yang mengkaji terkait implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di berbagai daerah, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketangguhan Masyarakat terhadap bencana, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian di atas, belum ada yang secara khusus dan spesifik meneliti Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji efektivitas Program Kelurahan Bencana pada wilayah non-pesisir seperti Kabupaten Ponorogo. GAP yang saya ambil dalam penelitian ini semakin jelas karena, Program Keltana di Ponorogo baru dibentuk pada bulan Mei 2025 dan diterapkan pada satu wilayah saja, yaitu Kelurahan Paju, serta berada pada tahap awal pembentukan kapasitas Masyarakat, sehingga belum tersedia penelitian mendalam mengenai bagaimana kebijakan nasional tersebut diimplementasikan di Kelurahan Paju, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana program ini berpengaruh terhadap peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan Masyarakat Paju dalam menghadapi bencana banjir yang berulang. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang secara mendalam mengkaji implementasi kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo sebagai Upaya untuk mengisi kekosongan literatur dan menjawab permasalahan efektivitas program dalam pengurangan risiko bencana banjir.

G. Landasan Teori

Teori Implementasi Kebijakan Edward III menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh proses pelaksanaannya di lapangan, bukan semata-mata oleh kualitas peraturan yang ditetapkan. Dalam teori ini, implementasi dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang menuntut adanya pemahaman yang selaras antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Terdapat empat variabel utama dalam teori ini antara lain, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo, penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III, terdapat empat indikator, antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi merujuk pada bagaimana pesan kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana, serta dari pelaksana kepada kelompok sasaran. Dengan demikian, komunikasi menjadi faktor utama dalam menghubungkan tujuan kebijakan dengan pelaksana di lapangan. Implementasi kebijakan menuntut adanya penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Melalui komunikasi yang efektif, pelaksana akan memperoleh pemahaman yang tepat mengenai substansi, prosedur, dan sasaran kebijakan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan penyimpangan informasi, akibatnya dapat mengurangi kualitas implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang menentukan kapasitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Teori ini menyatakan bahwa, kebijakan yang baik tidak akan berjalan apabila tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan sarana-prasarana, serta otoritas atau

kewenangan yang jelas. Ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi syarat dasar agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal.

3. Disposisi Pelaksana

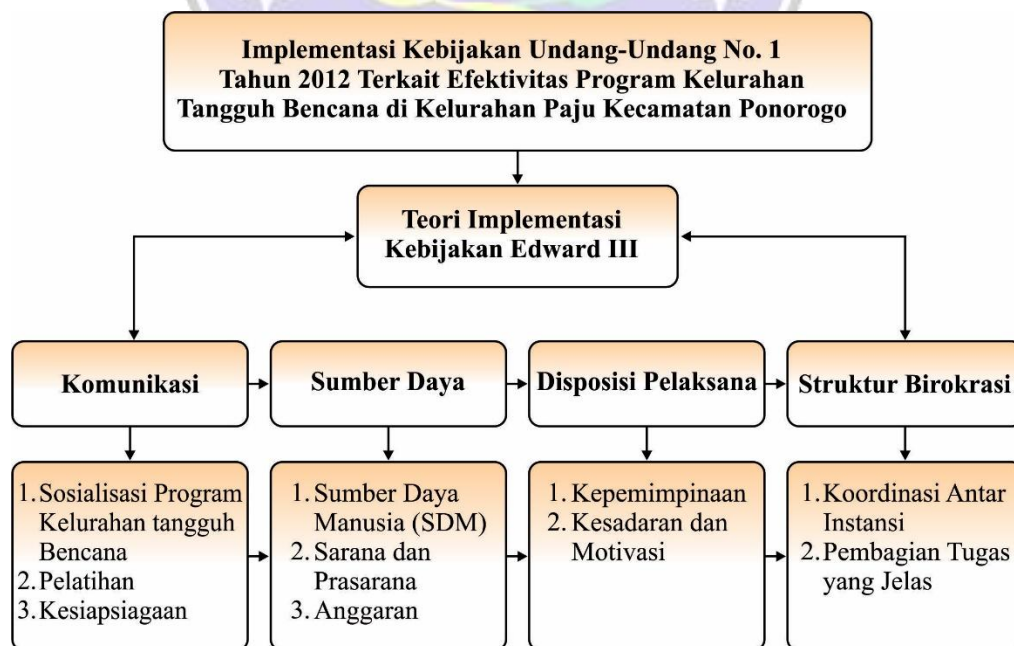
Disposisi mengacu pada komitmen, motivasi, dan kesediaan pelaksana dalam menerapkan kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif, memahami tujuan kebijakan, serta memiliki komitmen yang kuat akan mendorong tercapainya implementasi yang efektif. Disposisi penting karena kebijakan, pada akhirnya, sangat dipengaruhi oleh perilaku aktor pelaksana di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, prosedur, SOP (Standard Operating Procedures), dan koordinasi antarunit yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Jenis Partisipasi ini berhubungan dengan aspek pelaksanaan program secara keseluruhan. Koordinasi antarbagian juga menjadi aspek penting dalam memastikan setiap tahap implementasi berjalan sesuai perannya masing-masing.

H. Definisi Operasional

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan Program Keltana



Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 dipahami sebagai proses pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo, yang dianalisis melalui teori implementasi kebijakan Edward III. Teori ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi :

1. Komunikasi

Dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju, komunikasi mencakup bagaimana Pemerintah Kelurahan, BPBD, serta relawan menyosialisasikan ketentuan UU No. 1 Tahun 2012 terkait pengurangan risiko bencana. Efektivitas program sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai prosedur kesiapsiagaan, pembentukan struktur Keltana, hingga mekanisme respon bencana dapat diterima dengan baik oleh warga. Contohnya, kegiatan pembukaan serta pembentukan program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju, serta melakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana banjir.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Keltana di Kelurahan Paju, sumber daya menjadi penentu efektivitas terutama karena program ini membutuhkan fasilitas seperti alat peringatan dini, perlengkapan evakuasi, posko bencana, serta tenaga relawan yang terlatih. Selain itu, ketersediaan anggaran juga menjadi elemen penting dalam sumber daya. Khusus Kelurahan Paju, anggaran untuk Program tersebut semua dari APBD Provinsi Jawa Timur.

3. Disposisi Pelaksana

Dalam penelitian ini, indikator disposisi berkaitan dengan sikap aparat kelurahan, BPBD, dan relawan Keltana di Kelurahan Paju dalam mendukung implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Jika para pelaksana memiliki kepedulian tinggi, respons cepat, dan konsistensi dalam membina masyarakat, maka efektivitas program akan meningkat. Sebaliknya, apabila pelaksana menunjukkan sikap pasif, kurang inisiatif,

atau tidak memahami tugasnya, maka UU No. 1 Tahun 2012 tidak akan terimplementasi secara maksimal di tingkat kelurahan. Contohnya, pemerintah Kelurahan Paju aktif mengajak warganya termasuk tokoh Masyarakat, karang taruna, ibu-ibu PKK, serta sebagian warga masyarakat Kelurahan Paju dalam sosialisasi program Kelurahan Tangguh Bencana.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi Program Keltana di Kelurahan Paju, struktur birokrasi menentukan apakah kegiatan pengurangan risiko bencana berjalan sesuai pedoman Perka BNPB No. 1 Tahun 2012. Koordinasi antara kelurahan, BPBD, menjadi kunci agar setiap tahapan mulai dari pembentukan organisasi Keltana, sosialisasi, hingga pelaksanaan simulasi bencana dapat berjalan teratur.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena judul yang diangkat berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo. Metode kualitatif digunakan untuk menggali seberapa efektif pelaksanaan program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Institusional. Pendekatan institusional dalam ilmu politik merupakan pendekatan yang menekankan peran dan fungsi lembaga-lembaga formal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur, aturan, prosedur, serta kapasitas lembaga yang menjalankannya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan institusional digunakan untuk menganalisis bagaimana Kelurahan Paju dan BPBD Ponorogo mengimplementasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 melalui Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji bagaimana struktur Keltana di

Kelurahan Paju dibentuk dan berfungsi, apakah pembagian kewenangan antar-seksi telah berjalan sesuai pedoman, serta bagaimana kualitas koordinasi antara kelurahan, BPBD, dan masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Ponorogo dan Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dengan fokus Implementasi Kebijakan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo. Kelurahan Paju dipilih sebagai lokasi dalam penelitian ini karena, Paju merupakan kelurahan pertama dan satu-satunya di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang dibentuk Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana). Selain itu, tingkat kerawanan banjir yang tinggi di wilayah tersebut, dan menganalisis seberapa efektif pelaksanaan program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian menggunakan Purposive Sampling. Teknik ini merupakan, penentuan sampel yang dilakukan dengan memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena peneliti membutuhkan informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan data yang relevan dan mendalam. Menurut (Subhaktiyasa, 2024) Purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan menetapkan kriteria tertentu yang dinilai sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini, umum digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memilih informan yang dianggap memiliki relevansi tinggi dengan fokus kajian. Melalui purposive sampling, peneliti dapat mengarahkan pengumpulan data pada individu atau kelompok yang memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus mengenai fenomena yang akan diteliti.

Informan penelitian merupakan individu atau kelompok yang memberikan informasi, pandangan, pengalaman, atau data yang relevan dengan topik penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini meliputi :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

Peran / Jabatan	Keterangan
Staff BPBD Ponorogo	BPBD adalah lembaga yang membina, mendampingi, dan melakukan supervisi terhadap Program Keltana. Informan dari BPBD dapat memberikan perspektif mengenai kebijakan, pedoman, standar Keltana, serta evaluasi program di Kelurahan Paju.
Kepala Kelurahan/Aparat Kelurahan Paju	Sebagai informan kunci, karena memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan program pemerintahan di tingkat kelurahan, termasuk Program Keltana. Lurah dapat memberikan informasi terkait dukungan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan kegiatan kebencanaan, serta sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 dijalankan, yang berperan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan program mitigasi Kelurahan Tangguh Bencana serta sosialisasi kesiapsiagaan bencana.
Tokoh Masyarakat (Anggota Keltana)	Dalam konteks ini, Khususnya tokoh masyarakat yang sudah terlibat dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana. Mereka, merupakan pelaksana teknis program di lapangan ketika terjadi bencana banjir. Tokoh Masyarakat, dapat memberikan pemahaman mengenai kegiatan seperti, pelatihan, sosialisasi, dan persiapan sarana prasarana kebencanaan. Informasi dari kelompok ini penting

Peran / Jabatan	Keterangan
	untuk mengetahui apakah struktur organisasi berjalan dengan baik atau tidak, serta untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan.
Masyarakat Paju yang Terdampak	Sebagai penerima manfaat Program Keltana, secara administratif program tersebut memang sudah dibentuk meliputi, koordinator, ketua, dan pembagian tim. Tetapi, belum dijalankan secara langsung karena belum terjadi bencana banjir.

4. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait topik penelitian. Tujuan dari wawancara adalah memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai pengalaman, opini, dan sudut pandang seseorang terhadap fenomena yang sedang dikaji. Pelaksanaannya dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, tergantung pada sejauh mana pedoman pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. (Novi Rudiyantri et al., 2025). Teknik pengumpulan data wawancara dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.1 Tahun 2012 Terkait Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari para informan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program Keltana, seperti pihak BPBD Ponorogo, Lurah Paju, pengurus Kelurahan Tangguh Bencana, serta masyarakat yang menjadi bagian dari kegiatan kesiapsiagaan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan

dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta bagaimana efektivitas program dirasakan oleh para pelaksana maupun masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kejadian, aktivitas, atau perilaku di lingkungan nyata. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyaksikan dan mencatat berbagai peristiwa sebagaimana adanya, tanpa memberikan intervensi atau mempengaruhi situasi yang sedang diamati. (Novi Rudiyantri et al., 2025). Teknik observasi dalam penelitian terkait dengan pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Paju. Melalui teknik ini, peneliti mengamati keberadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebencanaan, seperti posko siaga bencana, rambu dan jalur evakuasi, perlengkapan tanggap darurat, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti arsip, dokumen, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa laporan, catatan, surat menyurat, buku, foto, maupun dokumen resmi lainnya. (Nafisatur, 2024). Dokumen yang dikumpulkan antara lain bisa berupa, profil kelurahan, Surat Keputusan (SK) pembentukan Keltana, laporan kegiatan, data kejadian bencana, pedoman atau SOP kebencanaan, serta foto-foto kegiatan yang mendukung pelaksanaan program. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung yang menguatkan temuan penelitian, sekaligus menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2012.

5. Keabsahan Data

Dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) Di Kelurahan Paju Kabupaten

Ponorogo, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik untuk memeriksa keabsahan atau kebenaran data dalam penelitian dengan membandingkan atau menggabungkan berbagai sumber informasi, metode, atau perspektif. Triangulasi dapat diartikan sebagai proses verifikasi data melalui berbagai sumber informasi, menggunakan beragam metode dan dilakukan dalam waktu yang berbeda. (Nastiar, 2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, seperti Kepala kelurahan Paju, BPBD Ponorogo, serta warga yang terlibat dalam Program Keltana. Perbandingan ini penting untuk melihat konsistensi informasi terkait bagaimana program dijalankan, bagaimana koordinasi terbentuk, serta seberapa efektif program Keltana dirasakan oleh masyarakat. Teknik triangulasi digunakan dengan memadukan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Misalnya, pernyataan informan mengenai prosedur mitigasi akan dikonfirmasi melalui observasi kegiatan Keltana dan diperkuat dengan dokumen seperti SK pembentukan Keltana, laporan kegiatan, maupun foto-foto aktivitas pelatihan bencana. Triangulasi ini, juga dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda agar peneliti dapat menangkap dinamika pelaksanaan program, sehingga tidak hanya bergantung pada satu kondisi tertentu. Penggunaan triangulasi ini memastikan bahwa data yang diperoleh lebih mendalam, dan mampu menggambarkan secara akurat efektivitas implementasi kebijakan dalam membangun ketangguhan bencana di Kelurahan Paju.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman. Metode ini merupakan sebuah pendekatan sistematis dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan tema, pola, dan makna dari data yang kompleks, biasanya dikenal dengan metode analisis data interaktif. (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan secara berulang dan saling terkait,

berjalan terus menerus hingga data mencapai titik kejenuhan. (Safrudin et al., 2023).

Terkait Implementasi Kebijakan Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo, umumnya bersifat kualitatif dan induktif. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap makna dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat menggambarkan bagaimana pihak kelurahan, BPBD, dan masyarakat berperan dalam menjalankan program, bagaimana proses koordinasi berlangsung, serta sejauh mana program Keltana berjalan efektif berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*),

Yaitu memilah dan menyederhanakan data mentah dari lapangan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti mekanisme pelaksanaan program, pola koordinasi antar-aktor, dukungan pemerintah, tingkat keterlibatan masyarakat, serta hambatan implementasi kebijakan. Data yang dikumpulkan dari lapangan biasanya sangat banyak dan rinci, sehingga penting untuk mencatatnya secara cermat. Seiring waktu berada di lapangan, jumlah data akan semakin bertambah dan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan analisis dengan cara mereduksi data. Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilih informasi penting, mengidentifikasi tema serta pola, dan menghilangkan data yang kurang relevan. Hasil dari reduksi ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta dalam pencarian data jika diperlukan. (Nurrisa et al., 2025). Proses reduksi ini berjalan terus-menerus sepanjang penelitian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kategori, tema, dan pola yang menggambarkan bagaimana efektivitas program Keltana terbentuk di lapangan.

2. Penyajian Data (*Display*),

Yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar-

variabel dalam penelitian. Dalam penyajian ini, data dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, ringkasan wawancara, kutipan langsung dari informan, serta matriks yang menunjukkan hubungan antara indikator implementasi kebijakan program keltana dengan temuan di lapangan. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan dijalankan, siapa saja aktor yang berperan, bagaimana kegiatan Keltana dilaksanakan, serta seberapa efektif program Keltana di Kelurahan Paju dijalankan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti mulai menyusun dan menguraikan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi Kebijakan No. 1 Tahun 2012 berjalan di Kelurahan Paju, serta bagaimana koordinasi komunikasi antara BPBD, Kelurahan Paju, Anggota Keltana, Masyarakat Paju dalam pelaksanaan pembentukan Program Keltana. Kesimpulan tidak ditarik secara langsung, melainkan melalui proses verifikasi yang berkesinambungan, yaitu membandingkan data antar-informan, mencocokkan temuan dengan observasi lapangan, dan memastikan validitas data melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Tahap ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga temuan penelitian mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas program Keltana di wilayah penelitian yaitu Kelurahan Paju Kabupaten Ponorogo.